

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan teoritis, dan data sekunder mengenai implementasi agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) oleh UN Women melalui *National Action Plan on Women, Peace and Security* (NAP-WPS) di Filipina periode 2015–2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa UN Women memiliki kontribusi yang signifikan dalam menginternalisasikan norma-norma Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 ke dalam kebijakan dan praktik nasional. Kontribusi tersebut tidak hanya terlihat sebagai penyedia bantuan teknis, tetapi juga sebagai organisasi internasional yang menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, penguatan kapasitas, serta penyebaran norma internasional. Efektivitas peran UN Women tercermin melalui implementasi empat pilar utama agenda WPS, yaitu partisipasi, perlindungan, pencegahan, serta bantuan dan pemulihan, yang secara bersama-sama memperkuat pembangunan perdamaian yang inklusif dan responsif gender di Filipina, khususnya di wilayah Mindanao dan Bangsamoro.

Pada pilar partisipasi, penelitian menunjukkan bahwa UN Women berhasil mendorong transformasi keterlibatan perempuan dari sekadar representasi simbolis menjadi partisipasi yang substantif dalam proses perdamaian. Melalui dukungan terhadap negosiasi antara Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), penguatan kapasitas organisasi perempuan seperti Bangsamoro Women Commission (BWC), serta implementasi NAP-WPS, perempuan memperoleh ruang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan Bangsamoro Organic Law (BOL). Temuan ini menunjukkan fungsi organisasi internasional sebagaimana dikemukakan Archer sebagai fasilitator kerja sama, sekaligus memperkuat konsep Abbott dan Snidal mengenai sentralisasi, di mana UN

Women mampu mempertemukan berbagai aktor dan mengurangi hambatan koordinasi sehingga perempuan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan perdamaian.

Pada pilar perlindungan, UN Women berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan melalui pengembangan kebijakan responsif gender, peningkatan kapasitas aparat keamanan, serta penguatan mekanisme penanganan kekerasan berbasis gender, khususnya di wilayah Bangsamoro. Program digitalisasi pelaporan kasus kekerasan, penguatan *Women and Children Protection Desks*, serta penerapan pendekatan *survivor-centred* menunjukkan keberhasilan internalisasi prinsip-prinsip Resolusi 1325 ke dalam sistem nasional Filipina. Temuan ini sejalan dengan pandangan Barnett dan Finnemore bahwa organisasi internasional memiliki otoritas normatif untuk menyebarluaskan nilai dan standar internasional, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma keamanan dari *state security* menuju *human security* sebagaimana dijelaskan oleh Jacqui True (True, 2012).

Pada pilar pencegahan, penelitian menemukan bahwa UN Women berhasil memperkuat ketahanan masyarakat melalui program *Preventing Violent Extremism* (PVE), pemberdayaan perempuan, pelatihan aparat keamanan, dan pengembangan *Community-Based Early Warning and Early Response System* (CBEWERS). Melalui pendekatan *Theory of Change* dan *4-Track Approach*, UN Women mengintegrasikan riset, penguatan kapasitas, pemberdayaan komunitas, dan advokasi kebijakan dalam satu mekanisme yang saling mendukung. Pendekatan tersebut mendorong terciptanya strategi pencegahan yang berada pada tingkat Gender Transformative, yaitu tidak hanya merespons dampak konflik, tetapi juga mengatasi akar penyebab kekerasan dan ketimpangan gender melalui penguatan kohesi sosial serta partisipasi aktif perempuan dalam menjaga keamanan komunitas.

Sementara itu, pada pilar bantuan dan pemulihan, UN Women berperan penting dalam mendukung rekonstruksi sosial dan ekonomi pascakonflik, terutama setelah Krisis Marawi tahun 2017. Melalui metode *Listening Processes*, suara perempuan pengungsi dijadikan dasar penyusunan program pemulihan, sementara kerja sama dengan *Women's Peace and Humanitarian Fund* (WPHF) memungkinkan penyaluran bantuan ekonomi, dukungan psikososial, pembangunan *women-friendly spaces*, serta penguatan kapasitas organisasi perempuan lokal. Kontribusi ini menunjukkan fungsi organisasi internasional sebagai mekanisme redistribusi sumber daya dan koordinasi lintas aktor yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat lokal. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai penerima bantuan semata, tetapi sebagai agen utama dalam proses rehabilitasi dan pembangunan kembali komunitas pascakonflik.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi agenda WPS di Filipina tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga pada peran UN Women sebagai organisasi internasional yang mampu menjembatani norma global dengan kebutuhan lokal. Melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, sentralisasi, penguatan kapasitas, dan penyebaran norma internasional, UN Women berhasil mendorong integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan perdamaian dan keamanan nasional Filipina. Kontribusi tersebut tidak hanya meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan konflik serta pemulihan pascakonflik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi agenda WPS oleh UN Women menunjukkan bahwa perempuan merupakan aktor strategis dalam pembangunan perdamaian, sehingga pengarusutamaan perspektif gender menjadi elemen penting dalam mewujudkan keamanan manusia (*human security*) dan perdamaian yang berkelanjutan di Filipina.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan bagi pengembangan implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) maupun kajian Hubungan Internasional. Secara praktis, Pemerintah Filipina diharapkan memperkuat implementasi National Action Plan on Women, Peace and Security (NAP-WPS) hingga tingkat pemerintahan daerah melalui penyusunan Regional Action Plans yang didukung alokasi anggaran berkelanjutan. Langkah ini penting untuk memastikan pelaksanaan agenda WPS berjalan lebih efektif, merata, dan responsif terhadap dinamika keamanan lokal. Di sisi lain, UN Women diharapkan terus memperluas program pemberdayaan ekonomi, literasi digital, dan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan, terutama di wilayah-wilayah pascakonflik yang masih memiliki tingkat kerentanan tinggi, sehingga ketahanan masyarakat dan keberlanjutan perdamaian dapat terus terjaga.

Secara akademis, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai implementasi agenda WPS melalui analisis pada tingkat komunitas (micro-level analysis) maupun studi komparatif dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang memiliki karakteristik konflik serupa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proses internalisasi norma Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325, tantangan implementasi di tingkat lokal, serta efektivitas strategi pembangunan perdamaian yang inklusif di kawasan.